



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komunikasi adalah sebuah proses membuat atau membagikan dalam sebuah percakapan tidak formal, komunikasi dalam grup, atau *public speaking* (Verderber & Verderber, 2008, p. 4). Pada tahapan berkomunikasi, pastilah di dalamnya terdapat isi pesan yang ingin disampaikan. Isi pesan bisa disampaikan secara verbal dan tidak verbal, tergantung dari apa konteks pembahasan dan siapa penerima tersebut (Verderber & Verderber, 2008, p. 5). Isi pesan yang hendak disampaikan bisa terbagi dalam berbagai macam bentuk, seperti pemikiran/tanggapan, simbol, *encoding* dan *decoding*, dan kuesioner (Verderber & Verderber, 2008, p. 5).

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemungkinan manusia terlahir dengan kecacatan pada tubuhnya. Kecacatan tersebut tentu akan menghambat seseorang untuk beraktivitas. Seorang yang terlahir tuli akan sulit untuk berkomunikasi karena ia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pengirim pesan. Pada kecacatan yang mereka miliki itu pun, membuat mereka sulit untuk mempelajari Bahasa Indonesia karena dibutuhkan indra pendengaran untuk belajar sebuah bahasa yang membutuhkan suara. Oleh karena itu, dibuatlah bahasa isyarat. Bahasa isyarat menjadi bahasa ibu bagi tuna rungu (tidak bisa mendengar) dan tunawicara (tidak

bisa berbicara) untuk berkomunikasi. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang dikomunikasikan secara visual, biasanya dilakukan menggunakan gerakan tangan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Sarana komunikasi ini bisa diajarkan dengan alat bantu pendengar dan bahasa tertulis (kumparan.com, 2017, para. 2).

Pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pendataan survei khusus disabilitas seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Pendataan ini juga dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, karena kendala anggaran, untuk beberapa saat pendataan jumlah penyandang disabilitas terhambat. Kemudian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 telah berhasil membuat uji coba terhadap penyandang disabilitas (Solider, 2018, para. 5). Total penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebanyak 8,56 persen. Persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar adalah 0,09 persen yang tidak bisa mendengar sama sekali, 0,57 persen yang mengalami kesulitan saat mendengar, dan 2,69 persen yang mengalami sedikit kesulitan mendengar (Solider, 2018, para. 24).

Dengan adanya bahasa isyarat, para tunarungu pun akhirnya memiliki cara untuk berkomunikasi dengan sesama. Namun, masalah belum selesai sampai di situ. Para tunarungu kembali menghadapi masalah ketika membahas mengenai komunikasi massa secara visual, salah satunya adalah televisi. Komunikasi massa dari televisi tidak bisa mereka konsumsi karena keterbatasan yang mereka miliki. Padahal, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh media. Hal tersebut tertulis pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada undang-undang tersebut, tertulis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, seharusnya para tunarungu pun juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh media visual televisi tersebut.

Pada Desember 1994, stasiun televisi TVRI, RCTI, SCTV, dan TPI, untuk pertama kalinya menampilkan seorang interpreter (kpi.go.id, 2016, para. 5). Interpreter merupakan seseorang yang bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat yang dapat ditemukan di pojok bawah siaran televisi. Namun, hingga tahun 2016, hanya stasiun TVRI –lah yang masih tetap memberikan tayangan berita dengan interpreter. Hal ini membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hendak mengaktifkan kembali penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran di semua lembaga penyiaran televisi yang berjaringan secara nasional (kpi.go.id, 2016, para. 1). Kebijakan mengenai kewajiban penggunaan interpreter sudah dikeluarkan sejak Agustus 2017 lalu. Beberapa stasiun televisi mulai menampilkan interpreter pada siaran mereka, salah satunya iNewsTV. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan terus menegaskan perihal revisi UU Penyiaran terhadap penggunaan bahasa isyarat (bisnis.tempo.co, 2017, para. 2).

Salah satu stasiun televisi swasta yang menggunakan interpreter pada siarannya adalah, iNewsTV. iNewsTV merupakan bagian dari MNC Media. iNewsTV merupakan saluran televisi yang secara khusus membawa siaran yang bersifat *hardnews*. Artinya, isi pada siaran tersebut lebih cenderung menayangkan hal-hal yang bersifat terkini dan terbaru. Sesuai dengan slogan mereka, iNewsTV selalu membawa tayangan yang informatif dan juga menginspirasi. Salah satu redaksi yang menggunakan interpreter pada siaran mereka adalah redaksi iNews Siang.

Tak terasa masa-masa pemerintahan Presiden Ke-7, Joko Widodo sudah hampir selesai. Tepat pada 2019 nanti, Pilpres pun akan kembali diselenggarakan. Hal ini tentu sangat penting, karena rakyat akan memilih sendiri calon presiden yang akan mengayomi mereka selama lima tahun ke depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019 pada Sabtu 4 Agustus 2018 (Lampung.Tribunnews.com, 2018, para. 1). Setelah melewati beberapa tahap, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan sebanyak dua calon atau paslon pasangan capres-cawapres untuk bertarung pada Pilpres 2019 nanti. Calon-calon tersebut adalah Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Liputan8.com, 2018, para. 1).

Hary Tanoesoedibjo merupakan *chairman* atas MNC Media dan ketua dari partai politik Perindo yang ia dirikan pada 2015. Partai Perindo ini sendiri masuk ke

dalam koalisi bersama partai-partai lain untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dua hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keberpihakan. Pada beberapa berita yang disiarkan, terlihat adanya sebuah keberpihakan yang dilakukan oleh pihak iNewsTV. Siregar (dalam Iskandar, 2015, p. 28) berpendapat bahwa keberpihakan yang dilakukan oleh suatu media akan memberikan tempat yang total bagi pihak yang didukung, sementara kompetitornya tidak diberikan tempat. Beliau menganggap bahwa itu sudah termasuk ke dalam kampanye gelap karena asas keseimbangan dan ketidakberpihakan untuk menciptakan berita yang netral sudah tak lagi dihormati.

Menyinggung mengenai hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi, yang secara jelas sudah tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana makna yang didapatkan oleh khalayak tunarungu melalui berita yang disampaikan oleh interpreter. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis resepsi untuk kelancaran penelitian. Menurut McQuail (1997) analisis resepsi secara khusus mempelajari sebuah kultur atau tradisi yang saling berhubungan antara ilmu komunikasi dengan kemanusiaan. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana khalayak tunarungu dalam menerima dan menanggapi sebuah berita yang nantinya akan mereka lihat. Selain itu, penulis akan menggunakan metode pengumpulan informasi yang sifatnya lebih dalam, yaitu *indepth interview*. Metode ini kerap dilakukan untuk mendapatkan isi

pesan yang beritanya bersifat sensitif (Hadi, 2008, p. 6). *Indepth interview* biasa dilakukan empat mata oleh peneliti dan narasumber, agar peneliti bisa mendapatkan reaksi penerimaan, pemahaman, dan interpretasi individu lebih dalam lagi (Hadi, 2008, p. 6).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan besarnya jumlah peyandang tunarungu di Indonesia, juga hak mereka untuk bisa mendapatkan informasi yang hanya bisa dibantu oleh interpreter, penulis merumuskan masalah tersebut ke dalam satu pertanyaan, yaitu bagaimana penerimaan khalayak tunaungu dalam berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana penerimaan makna oleh khalayak tunarungu dari berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang?
2. Di mana posisi khalayak tunarungu dalam menanggapi berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang?
3. Apakah interpreter pada berita yang ditayangkan mampu menyampaikan isi berita dengan benar?

1.4 TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan makna oleh khalayak tunarungu dari berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang.
2. Untuk mengetahui di mana posisi khalayak tunarungu dalam menanggapi berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang.
3. Untuk mengetahui apakah interpreter pada berita yang ditayangkan mampu menyampaikan isi berita dengan benar atau tidak.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir pembaca terhadap perkembangan ilmu komunikasi pemberitaan, khususnya terhadap media televisi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para penyandang tunarungu terhadap hak mereka dalam mendapatkan informasi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stasiun televisi untuk lebih peduli lagi bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga hak masyarakat yang tertulis dalam Undang-Undang Penyiaran terealisasi dengan baik.

c. Kegunaan Sosial

Penulis berharap agar seluruh stasiun televisi di Indonesia menyadari bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi darimana saja tanpa membedakan satu sama lain.

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN

Ada beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh penulis saat menulis penelitian ini. Pertama adalah periode Pilpres 2019. Pemilu akan dilaksanakan pada April 2019 (DetikNews, 2018, para. 5). Oleh karena itu, penulis nantinya hanya akan meneliti perkembangan berita Pilpres 2019 mulai dari Agustus 2018 hingga Desember 2018, tepat setelah KPU menentukan calon presiden dan wakil presiden 2019. Kedua, mengenai sampel berita. Dari sekian banyak berita yang disiarkan, peneliti nantinya hanya akan memilih 2 berita yang memberikan perkembangan informasi terkait Pilpres 2019. Ketiga adalah mengenai informan. Akibat keterbatasan penulis dalam mencari informan penyandang tunarungu, maka hanya akan ada sebanyak 6 orang yang akan menjadi informan penulis. Keempat adalah mengenai kurangnya ilmu pengetahuan penulis mengenai bahasa isyarat. Penulis harus membuat janji dengan interpreter saat ingin mewawancarai penyandang tunarungu, karena penulis tidak bisa menggunakan bahasa isyarat.